

Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2024

Kecamatan Tambak



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN TAMBAK

Jalan Raya Tambak Nomor 16 Telp. (0287) 472524

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan TAMBAK Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU No 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Tahun 2024-2029.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan TAMBAK.

TAMBAK, 02 Januari 2024

CAMAT TAMBAK


IKA SUPRIHATIN, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19780825 199810 2 001

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul	
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	11
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	34
2.3. Review terhadap Renja Kecamatan Tambak Tahun 2024.....	38
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	48
Bab IV Penutup	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap , dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Rencana Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan sebagai berikut :

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Renja Perangkat Daerah Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai yang terjadi dan menuangkannya dalam Rencana Kerja (RENJA).

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (Renja) Tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD.

yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) , Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui

penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2021.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Tambak dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Tambak selama tahun 2024

I.4. SISTEMATIKA

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2023 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2023, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan IV atau semester II Tahun Anggaran 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan IV tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut

:

RENJA 2024 Kec. Tambak

Kategori	Pemerintah	Swasta	Masyarakat	Lain-lain	Total	%	Keterangan	Kategori	Pemerintah	Swasta	Masyarakat	Lain-lain	Total	%	Keterangan	Kategori	Pemerintah	Swasta	Masyarakat	Lain-lain	Total	%	Keterangan
INDONESIA	100	0	0	0	100	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100	
PROGRAM	100	0	0	0	100	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100	
KABUPATEN	100	0	0	0	100	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100	
KABUPATEN	100	0	0	0	100	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100	
KABUPATEN	100	0	0	0	100	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	100	

RENJA 2024 Kec. Tambak

Kategori	Sub-kategori	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen
SUKSES ATANJALX X01.2.01.01	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.02	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.03	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.04	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.05	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.06	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.07	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.08	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.09	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.10	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.11	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.12	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.13	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUKSES ATANJALX X01.2.01.14	Penguasaan Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daerah	3	3	3	3																										

RENJA 2024 Kec. Tambak

Musi	warah	Pencan	anahan	Pencan	ngusan	n di	Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	6.786.000	3.775.810	4.314.000	13.825.810	50,17		
1	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
2	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
3	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
4	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
5	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
6	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
7	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
8	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
9	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
10	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
11	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
12	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
13	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
14	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
15	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
16	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
17	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
18	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
19	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
20	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
21	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
22	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
23	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa	rkeat	yang
24	Jumlah	Dokum	ent	Sektor	rbuat	Progr	em	Kerji	dan	Kagat	an	Pemb	ridyas	n	Masa		

RENJA 2024 Kec. Tambak

Kecamatan	Jumlah Laporan	Jumlah Peringkat	Jumlah Elemen	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perbaikan	Jumlah Inovasi	Jumlah Nyerak	Jumlah Wilayah	Jumlah Kecamatan
SUKSES	10.001.000	2.200.000	5.768.000	16.575.000	80.85				
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
SUKSES	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000

Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SUBKEGI ADAM170 1.04.2.01. 01 Seringas dengan Kapasitas n Negara di Indonesia Tercana Modern Indonesia dan mencari terampil di kawasan secukupnya	300000000	500000000	325000000	355000000	181371000	87739718	66710718	13242														
Jumlah Lapora n Hasil Sinyal o r m denga n Kendal ian Negara REPUBLIK Indonesia Tertar a Nasion al Indonesia dan instans l Verdoo i di Wilyay h Secam 2024	1	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Dari tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Tambak sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2023 dapat dilihat bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai lebih dari 100% (101,16%) yaitu Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat Waktu,

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.443.399.349 dengan 5 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan perhatian di Kecamatan Tambak tahun 2024 adalah

1. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan menjadi tantangan Kecamatan Tambak. Kecamatan Tambak mempunyai tugas peran strategis di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
 - a. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
 - 2) pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
 - 3) pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

4. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
 - i. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional ;

Gambar
Struktur Organisasi Kecamatan Tambak



2.3 Review Terhadap Renja Kecamatan Tambak Tahun 2023

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja OPD se Kabupaten Banyumas yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tambak. Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kecamatan Tambak dan Pemerintah Kabupaten Banyumas karena adanya review terhadap Renstra, maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Tambak.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan IV dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

3.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan TAMBAK Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan
7.01.0.00.0.00.26.00 KECAMATAN TAMBAK				
7.01.0.00.0.00.26.01 KECAMATAN TAMBAK				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan

			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	

			Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan

		Ketertiban di Tingkat Kecamatan		gangguan trantibumlinmas
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

RENCANA KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TAMBAK

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	100%	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$
a.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	$(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$
b.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	82.05	Nilai SAKIP kecamatan
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	$\text{APBDes tepat waktu} / \text{Total APBDes} \times 100\%$
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Nilai IKM
	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	$\text{Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani} / \text{Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi} \times 100\%$
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	$\text{Jumlah capaian seluruh sub kegiatan} / \text{Jumlah seluruh sub kegiatan}$
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	$\text{Urusan penugasan yang dilaksanakan} / \text{urusan penugasan yang direncanakan} \times 100\%$

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1			
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah		
7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Tambak																
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp2.421.899.349	Rp21.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.443.399.349	
7	01				KECAMATAN				Rp2.421.899.349	Rp21.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.443.399.349	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.317.899.349	Rp21.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.339.399.349	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.955.752.353	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.955.752.353	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp1.922.392.353	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.922.392.353	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Rp33.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.360.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
														T-	Tahun			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	(PAD)												
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun				Jumlah	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp0	Rp21.500.000	Rp0	Rp0	Rp21.500.000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp0	Rp6.500.000	Rp0	Rp0	Rp6.500.000	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp254.677.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp254.677.996	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp54.671.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.671.000	
Urusan			Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp14.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.000.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp186.006.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp186.006.996	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp50.639.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.639.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp17.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.850.000	

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ULMUM		Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.000.000
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.000.000
7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000
7	01	06	2.01	0003	Facilitasi Pengelolaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tambak Tahun 2024. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Tambak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2024, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Tambak dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.



IKA SURRIHATIN, S. STP
NIP. 19780825 199810 2 001